



**Judul** : Sri Mul CS Sibuk Nyari Duit: Dana BLBI Diuber-uber Utang Lapindo Dikejar - Lapindo Kasih Jaminan, Pemerintah Masih Mau Ngecek  
**Tanggal** : Sabtu, 29 Januari 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 1-8

# SRI MUL CS SIBUK NYARI DUIT Dana BLBI Diuber-uber Utang Lapindo Dikejar

SELAIN sibuk memburu aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan nilai triliunan rupiah, ternyata pemerintah juga tengah menagih utang kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Perusahaan milik Keluarga Bakrie tersebut mendapat dana talangan dari pemerintah karena tak bisa

membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dana talangan diberikan pada 2015 dengan nilai Rp 773 miliar. Dana talangan ini, harus dibayar Lapindo pada 2019. Namun, sampai 2019,

◆ **BERSAMBUNG KE HAL 8**

# Lapindo Kasih Jaminan, Pemerintah Masih Mau Ngecek

**Dana BLBI**  
... DARI HALAMAN 1

perusahaan tak kunjung melunasi. Karena belum dibayar juga, utangnya jadi membengkak menjadi sekitar Rp 2 triliun.

Sejak awal Januari lalu, Dirjen Kebijakan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban terus melakukan upaya penagihan. Kabar penagihan ini mulai terungkap dalam rapat dengar pendapat Kemenkeu dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Kamis lalu.

Kemarin, dalam acara bincang bareng DJKN, Rionald kembali menyinggung soal penagihan utang Lapindo yang telah jatuh tempo pada Juli 2019 itu. Menurut dia, hasilnya belum memuaskan.

Rio-sapaan Rionald mengatakan, pihak perusahaan sejauh ini telah memberikan penawaran untuk membayar utang melalui pengalihan aset, yaitu tanah di Sidoarjo. Namun, kata

dia, pihaknya tidak serta langsung menerima. Pihaknya masih perlu mempertimbangkan penawaran tersebut.

“Memang, ada perjanjian yang menyatakan penjaminan, tapi yang diutamakan pembayarannya,” kata anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, kemarin.

Rio mengatakan, pihaknya akan melihat dulu jaminannya seperti apa. Apakah ada nilainya atau tidak. “Penilai sudah bekerja dan penilaian itu sudah dilakukan, ini sedang kita lihat,” tuturnya.

Berapa jumlah utang PT MLJ? Menurut dia, PT MLJ memiliki utang jangka panjang hingga Rp 773 miliar. Jumlah ini belum termasuk bunga dan denda keterlambatan pengembalian.

Jika merujuk laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tagihan kepada Lapindo terdiri atas utang pokok Rp 773,38 miliar, bunga Rp 163,95 miliar, dan denda Rp 981,42 miliar. Jika ditotal, jumlahnya tembus Rp 2 triliun.

Rio menjelaskan, dari kewajiban tersebut Lapindo baru membayar Rp

5 miliar. Sejak pembayaran itu, perseoran sudah tidak lagi melanjutkan kewajibannya. “Semakin lama, dendanya akan kami hitung,” tutur Rio.

Di tengah upaya penagihan ini, muncul kabar tanah milik Lapindo itu memiliki kandungan logam tanah jarang. Logam ini dinilai sangat berharga dan langka. Temuan tersebut ditulis Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rio mengaku sudah mendengar kabar ada mineral yang cukup berharga di tanah Lapindo. Namun, ia dan jajarannya ingin memastikan kebenaran hal tersebut.

“Kita akan lihat apakah betul tanah tersebut bernilai atau tidak. Dalam hal tanah tersebut tidak bernilai, maka apapun selisihnya, itu akan kita tagihkan,” jelasnya.

Pihak PT MLJ belum memberikan komentar terkait kabar penagihan tersebut. Namun, Sekretaris Perusahaan Minarak Group, Ananda Arthaneli mengomentari soal kandungan mineral berharga di kawasan PT LMI. Kata

dia, tanah dan bangunan tersebut yang merupakan bagian dalam PAT 22 Maret 2007 yang sudah dilakukan jual beli oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Namun demikian, dia mengakui area ini merupakan jaminan dalam rangka pinjaman Dana Antisipasi sesuai yang diatur Perpres 76 tahun 2015 dan diatur dalam Perjanjian Dana Antisipasi. “Saat ini kami masih berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan *settlement* (penyelesaiannya),” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, klaim tingginya berbagai mineral yang tergolong Logam Tanah Jarang (LTJ) di lumpur Lapindo harus bisa dibuktikan secara komprehensif. Dia berharap pemerintah meneliti lagi.

“Sebaiknya Pemerintah meneliti lebih lanjut nilai kelayakan teknis dan ekonominya. Agar jangan menjadi pepesan kosong yang heboh di masyarakat atau menimbulkan euforia namun berujung hampa,” kata Mulyanto, kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin. ■ BCG